

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL PEMERINTAH MELALUI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KOTA PALANGKA RAYA

Asri

ABSTRACT

The No Slum City Program is a government response in dealing with slum problems that exist throughout Indonesia, this program is sourced from the center which will be directly included in the RPJM in areas that are declared slum. but at the implementation stage there are obstacles, especially the commitment of the community that is still lacking in terms of reducing the slums that occur in the community itself. The problem under study is a description of the Implementation of Social Policy through the Kumpak City Program in the City of Palangka Raya. This study uses a causal method supported by primer data in the form of in-depth interviews and observations as well as secondary data in the form of document review. From the results of this research, it was shown that the implementation of the Social Policy through the No-Slum City Program (KOTAKU) in the City of Palangka Raya had not been effective. This is based on the lack of socialization, inconsistency of the implementor, and not maximally utilizing the facilities and infrastructure that have been given and the lack of community commitment to achieve the objectives of the KotaKu Program. It is therefore recommended that the government make the community a commitment to the program, and it is hoped that the socialization should be directly in the community, not through the BKM that has been made because this is not effective if it is seen from the commitment of the community.

Keyword : Implementation, City Program Without Slums

PENDAHULUAN

Menurut CSU's *Urban Studies Department*, kawasan kumuh merupakan suatu wilayah yang memiliki kondisi lingkungan yang buruk, kotor, penduduk yang padat serta keterbatasan ruang (untuk ventilasi cahaya, udara, sinitasi, dan lapangan terbuka) (Hariyanto, 2007). Kondisi yang ada seringkali menimbulkan dampak yang membahayakan kehidupan manusia (misalnya kebakaran dan kriminalitas) sebagai akibat kombinasi berbagai faktor. Di Kalimantan Tengah khususnya kota Palangka Raya yang sedang berkembang, tentu perkembangan itu secara umum akan meningkatkan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, seiring pertumbuhan itu harus di barengi dengan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri terkhususnya pada bidang fasilitas fisik, sarana dan infrastruktur. Kebutuhan itu harus di penuhi agar tidak menimbulkan kawasan kumuh yang terjadi pada kota-kota yang berkembang dan besar pada umumnya. Menurut Kepala Dinas Cipta Karya Rojikinoor melalui Sekretarisnya Sobirin Muchtar, ada 5 kawasan kota yang termasuk dalam kategori kawasan kumuh yaitu

Danau Seha, Murjani Bawah atau Rindang Banua, Mendawai dan Pahandut Seberang. Dan Kelurahan Pahandut, Langkai, Pahandut Seberang, dan Tumbang Rungan, menurut SK Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/130/2016 semuanya masuk dalam kategori Kelurahan Kumuh, tambahnya. (Andika, 2016). Kawasan Komplek bengkel ini sudah cukup tua di Palangka Raya mulai tahun 1982 sudah ada pemukiman di kawasan murjani bawah ini. Luas wilayah murjani bawah 486,69 ha dan 31,75 ha tergolong kawasan kumuh dengan kepadatan penduduk 9.432 jiwa, adapun bangunan rumah tergolong kumuh 2.489 unit. Di dalam Profil itu sendiri terdapat 3 kawasan pemukiman kumuh yaitu, Komplek Mendawai, Murjani bawah dan Danau Seha dari ketiga lokasi ini Murjani Bawah yang termasuk dalam kategori kumuh berat, yang memiliki permasalahan utama yaitu, Kepadatan, Sanitasi, Jalan dan Persampahan. Program KotaKu (Kota Tanpa Kumuh) yang akan diturunkan ke pemerintah daerah sebagai kebijakan itu Kondisi kumuh yang ada di kawasan Komplek bengkel ini terjadi karena perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, ini terjadi karena tidak adanya tempat pembuangan sampah, sebelum adanya program ini masyarakat lebih sering membuang sampah dibawah jembatan, hal ini lah yang menjadikan kondisi kumuh di kawasan Komplek bengkel dan hal ini terus menerus terjadi, sampai sebelum adanya program itu diimplementasikan.

LANDASAN TEORI

Pendekatan pertama mendefinisikan kebijakan sosial sebagai seperangkat kebijakan negara menyangkut urusan kesejahteraan (*welfare policy*) yang dikembangkan untuk mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan dasar warganya melalui pemberian pelayanan sosial dan jaminan sosial. Pendekatan kedua mendefinisikan kebijakan sosial sebagai disiplin akademis/studi yang mempelajari kebijakan-kebijakan kesejahteraan, perumusan dan konsekuensi-konsekuensinya. Meskipun kedua pendekatan ini memiliki orientasi yang berbeda, baik secara ketetapan pemerintah (pendekatan pertama), maupun sebagai bidang studi (pendekatan kedua), keduanya menekankan bahwa kebijakan sosial adalah salah satu bentuk kebijakan publik yang menyangkut kesejahteraan sosial.

Implementasi kebijakan adalah kegiatan atau tindakan yang telah disusun sedemikian rupa dan terperinci, kebijakan yang memasuki proses implementasi adalah kebijakan yang telah di legislasi oleh stakeholder. Adapun model implementasi kebijakan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan Van Meter dan Van Horn (1975) yang mengemukakan model studi implementasi kebijakan, yang terdiri dari 6 variabel, yaitu :

- a. Ukuran/standart dan Tujuan Kebijakan, kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya (jika dan hanya jika) ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

- b. Sumber Daya, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. manusia merupakan yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi, ketika kompetensi dan kapabilitas. dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.
- c. Karakteristik Agen Pelaksana, pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana.
- d. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana, sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
- e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, Hal terakhir yang perlu diperhatikan pula, guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan social, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi faktor utama dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas, sosial, dan persepsi sasaran penelitian. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia, dan kerangka acuan perilaku sendiri, yakni bagaimana pelaku memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi

pendiriannya. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Palangka Raya yang baru saja mengenalkan kebijakan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah ditemukan. Miles dan Huberman (1992), mengemukakan ada 3 aktivitas yang dilakukan dalam melakukan analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan Tujuan Kebijakan

Dari kedua hal diatas, menurut peneliti bahwa implemtator yang ada diatas seperti Kordinator Kota, Fasilitator Kelurahan dan dinas-dinas yang terait dengan program ini sudah memahami apa yang menjadi standar ukuran dan tujuan dari program Kotaku tersebut. Tetapi disisi lain masyarakat tidak memahami akan tujuan yang ingin dicapai dari program Kotaku itu sediri seperti kutipan wawancara diatas. Dan dalam hal standart sarana dan prasaran yang menjadi target adalah 6+1 fasilitas yaitu, drainase, air bersih/minum, pengelolaan sampah, pembuangan air limbah, pengamanan kebakaran dan Ruang Terbuka Publik, dari 6+3 fasilitas tersebut hanya 3 fasilitas yang telah tersalurkan oleh program itu ini dikarena dana yang dimiliki program itu sendiri terbatas, namun bagi fasilitas pengamanan kebakaran yang ada di komplek bengkel ini sudah lama ada sebelum program ini di implementasikan dikawasan Komplek Bengkel tersebut, dan fasilitas pengamanan kebakaran itu sendiri didapat dari sumbangan dan urunan masyarakat.

Sumber Daya

Dalam suatu penyelenggaraan kebijakan tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan dipahami oleh aktor pelaksana, tetapi tidak hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program. Faktor sumberdaya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor penting yang harus selalu diperhatikan. Menurut peneliti dari hasil wawancara bahwa sumberdaya yang ada dalam program kotaku ini melibatkan seluruh masyarakat, namun hal ini berpengaruh terhadap respon masyarakat maksudnya jika masyarakat tersebut niat dan sukarela dalam ikut masuk menjadi SDM diprogram ini maka sumberdayanya mencukupi, disisi lain jika masyarakat ini tidak respon terhadap program ini maka sumberdaya yang ada dalam program ini menjadi kendala tersendiri terhadap program tersebut.

Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn harus ada kesesuaian antara kompetensi dengan posisi yang ditempatkan. Dari segi karakteristik dari agen

pelaksanaan, menurut peneliti karena program Kotaku ini banyak aktor implementasinya maka karakteristik yang tepat jika setiap aktor terus menerus bersinergi demi menjaga kekonsistensian agar suatu ukuran dan tujuan yang telah ditetapkan program Kotaku ini tidak keluar pada jalur seharusnya, apa lagi ini lembaga Badan Keswadayaan Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat yang paling dekat masyarakat lembaga ini harus bisa bersinergi keatas (dinas) dan kebawah (masyarakat) agar masyarakat selalu konsisten pada standar ukuran dan tujuan program Kotaku ini. Dari segi sinergisitas ini tentu berhubungan dengan standart dan tujuan yang ingin dicapai seperti yang dijelaskan diatas, jika sinergisitas dapat dilakukan dengan baik maka semakin besar dalam hal pencapaian standart dan tujuan program tersebut. Berbicara tentang sinergisitas dinyatakan diatas bahwa Kelompok Pengelolaan Pemeliharaan tidak dapat bersinergi baik dengan masyarakat dalam hal urusan iuran, pada faktanya Kelompok Pengelolaan Pemeliharaan tidak dapat meyakinkan masyarakat dan sebaliknya.

Sikap dan Kecendrungan Aktor Pelaksana

Salah satu hal mempengaruhi dalam implemenetasi kebijakan adalah sikap implementator. Respon atau sikap masyarakat yang kurang ini dapat menjadi masalah bagi Kelompok Pengelolaan Pemeliharaan, karena tanpa disadari bahwa uang uranan yang ada dapat digunakan untuk pemeliharaan dan operasional, jika banyak masyarakat yang menolak tentu dari sumberdaya keuangan akan mengalami defisit, karena pada dasarnya pengeloan dan operasional membutuhkan dana, seperti yang terjadi sekarang fasilitas seperti motor operasional yang telah rusak dan dari pihak Kelompok Pengeloan Pemeliharaan tidak memiliki dana untuk memperbaikinya karena banyak masyarakat yang menolak seinggga tidak terkumpulnya dana tersebut, dari segi operasional ini tidak rutin karena sulit untuk mencari orang yang ikhlas untuk bekerja berat dengan upah yang kecil, hal ini harus secepatnya bisa diselesaikan oleh Kelompok Pengelolaan Pemeliharaan.

Komunikasi Antarorganisasi

Agar kebijakan yang sedang dilaksanakan berjalan seacara efektif maka koordinasi harus terus dilakukan secara konsisten, karena koordinasi sangat diperlukan agar suatu standar ukuran dan tujuan yang telah ditentukan dipahami seluruh agen pelaksana, maupun implemetator yang terkait dengan implementasi kebijakan itu sendiri. Dari segi komunikasi antara Badan Keswadayaan Masyarakat dan Kelompok Pengelolaan Pemeliharaan tidak ada komunikasi karena Badan Keswadayaan Masyarakat yang sulit untuk ditemui, sebenarnya ini salah satu solusi dalam menagatasi konflik yang ada di Kawasan Komplek Bengkel tersebut, dengan adanya Badan Keswadayaan Masyarakat yang dapat membantu Kelompok Pengelolaan Pemeliharaan dalam meyakini lagi masyarakat dalam bentuk diskusi dan lain lain.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna melihat kinerja dari implementasi kebijakan dalam sudut pandang yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu sejauh mana implementasi lingkungan ekseternal ikut mendorong dalam keberhasilan kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa faktor eksternal hanya mendukung pada tahap persiapan implementasi program yang tidak merugikan masyarakat dari segi sosial, politik dan khususnya ekonomi, tetapi setelah implementasi berjalan pada tahap dimana aktor implementasi adalah masyarakat, faktor eksternal menjadi faktor yang tidak mendukung terhadap program Kotaku dikawasan Komplek Bengkel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Kota Tanpa Kumuh ini sudah berlangsung sejak awal 2016 dimana program ini baru diluncurkan oleh Pemerintah Pusat serentak diseluruh Indonesia dan hingga saat ini penyelenggaraan program Kotaku di kota Palangka Raya ini sudah berjalan dengan sesuai peraturan serta pedoman pelaksanaannya, ini terlihat dari adanya komitmen dari aktor pelaksana tahap atas yaitu Dinas PUPR, mereka berkomitmen dengan terus melakukan pelatihan-pelatihan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat yang ada di kota Palangka Raya. Tetapi tidak dapat dipungkiri dalam penyelenggaraan program Kotaku dikota Palangka Raya terdapat beberapa kendala. Tantangan terbesar dari program Kotaku ini bukan seberapa besar dana yang telah dikeluarkan untuk menangani permasalahan sosial kawasan kumuh ini, tetapi permasalahan terbesarnya adalah merubah budaya masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan juga tidak ada gerakan masyarakat untuk membersihkan sampah. Karena merubah budaya yang sudah sejak lama ini termasuk dalam hal yang sangat sulit diatasi oleh Program Kota Tanpa Kumuh di Komplek Bengkel.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan pelaksanaan program Kotaku, yaitu, tidak hanya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap Kelompok Kerja, seharusnya pemerintah terus menerus melakukan evaluasi dan mengingatkan agar keberfungsian ini terus berjalan oleh Kelompok Kerja, tanpa disadari Kelompok Kerja menjadi hal penting dalam program ini. Terkait dengan lingkungan sosial masyarakat seharusnya pemerintah, memberikan sosialisasi yang rutin terhadap masyarakat, dengan tujuan untuk merubah mindset masyarakat yang menjadi permasalahan utama program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anderson, James E. 1984. *Public Policy-Making*. New York: Holt, Rinehart and Wintson
- Akib, H. 2010. *Implementasi kebijakan: apa, Mengapa dan bagaimana*. Makasar: Jurnal Administrasi Publik
- Bardach, Eugene. 1977. *The implementation game*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Bessant, J, Watts, R, Dalton, T, Smith P. 2006. *Taking policy: how social policy in made*. Crows Nest: Allen and Unwin.

- Creswell, John, W. 2016. *Research design* diterjemahkan oleh: Achmad Fawaid dan Rianayati Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. 1994. *Public policy analysis: an introuduction*. New Jersey: Prentice-Hall Inc
- Dye, Thoma R. 1996. *Politics, economics, and the publics: policy outcome in the fifty state*. Chicago: Rand-McNally.
- Edward III, George C. 1980. *Implementation public policy*. Washington: Congressional Quarterly Press
- Haryanto, A. 2007. *Strategi penanganan kawasan kumuh sebagai upaya menciptakan lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat*. Bandung: Jurnal PWK Unisba
- Mazmanian, Daniel H and Paul A. Sabastier. 1983. *Implementation and public policy*. New york: HarperCollins.
- Miles. M. B. and Huberman. A. M. 1984. *Qualitative data analysis : a sourbook of new methods*. Carlifornia: SAGE publications Inc.
- Rhama, B. (2020). The meta-analysis of Ecotourism in National Parks. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 9(1), 1-17.
- Rhama, B. and Reindrawati, D. Y. (2019). Geotour Guide Competency in the Context of Safety Management. *Opción*, 35(24), 885-899. .
- Rhama, B. (2019). Psychological Costs on Tourism Destination. *Journal of Advanced Management Science*, 7(3), 100-106. doi: 10.18178/joams.7.3.100-106
- Rhama, B. (2018). The Analysis of the Central Kalimantan Tourism Development Plan Based on Ecotourism Policy Perspective. *Policy & Governance Review*, 2(3), 204-016. doi:10.30589/pgr.v2i3.110
- Rhama, B. (2014). Hubungan Antara Nilai Yang Dimiliki Stakeholder Terhadap Pengembangan Kebijakan Ekowisata Pada Taman Nasional Di Indonesia. *JISPAR*, 3(2), 47-73. doi:10.17605/OSF.IO/3ZYNH
- Rhama, B. (2013). Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata di Kalimantan Tengah. *JISPAR*, 2(2), 18-23. doi:10.17605/OSF.IO/27KV5
- Rhama, B. (2012). Kebijakan Publik Untuk Ekowisata di Kalimantan Tengah: Kebijakan Penataan Kawasan Ekowisata Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya. *JISPAR*, 1(1), 47-51. doi:10.17605/OSF.IO/T4W2U
- Saputra, F. Radian. 2013. *Studi tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah (jamkesda) di puskesmas sidomulyo kecamatan samarinda ilir kota samarinda*. Samarida: Jurnal Administrasi Negara.
- Spicker, P. 1993. *Poverty and social security: concepts and priciples*. London: Routhledge